

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA SATUAN KERJA POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Lili Indrawati

Politeknik Negeri Bandung

indratoriq@gmail.com

Abstract: *Accrual Government Accounting Standards (SAP) is a government accounting standard that records and acknowledges transaction, at the time the contract of transaction occur, regardless of the receipts or payment of cash and cash equivalents. The issuance of Government Regulation (PP) no 71 year 2010 concerning SAP revising PP 24 year 2005 concerning SAP, hence both central government and also regional are obliged to apply accrual based accounting during accounting and preparation of financial report. Based on this, the purpose of this study is to determine what factors affect the succes of the accrual-based SAP application in the units of Bandung State Polytechnic. This research is conducted by qualitative method with emphasis on interpretive approach. Data analysis is carried out through three steps, namely: 1) Data collection, 2) Data redustion, 3) Data presentation, and 4) Decesion making or verification. The result showed that: 1) The environment/condition oriented to the application of accrual accounting is very supportive; 2) existing regulation can be applied without constraints; 3) human resources are competent; 4) software help completion of work; 5) the existing hardware already supports and in accordance with the software; 6) financial statement can be completed and sent on time.*

Keywords: *Success Factor, Accrual Bases, Bandung State Polytechnic*

Abstrak: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual adalah suatu standar akuntansi pemerintahan yang mencatat dan mengakui transaksi, pada saat akad transaksi terjadi, tanpa memperhatikan penerimaan atau pembayaran kas dan setara kas. Diterbitkannya PP no 71 tahun 2010 tentang SAP yang merevisi PP 24 tahun 2005 tentang SAP, maka pemerintah baik pusat dan juga daerah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual saat pengakuntansian dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja politeknik negeri bandung. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menekankan pada pendekatan interpretif. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Pengambilan Keputusan atau Verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Lingkungan/kondisi yang berorientasi pada penerapan akuntansi akrual sangat mendukung; 2) regulasi yang ada dapat diterapkan tanpa kendala; 3) SDM sudah kompeten, 4) Software sangat membantu penyelesaian pekerjaan; 5) Hardware yang dimiliki sudah mendukung dan sesuai dengan software; 6) Laporan keuangan dapat diselesaikan dan dikirim tepat waktu.

Kata Kunci: Faktor Keberhasilan, Basis Akrual, Politeknik Negeri Bandung

1. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, pasal 36 ayat (1) mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja. Adapun ayat tersebut berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang merupakan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Standar akuntansi pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tanggal 13 Juni 2005, diterbitkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Menurut peraturan ini semua pemerintah daerah dan pusat wajib melakukan pencatatan sesuai standar yang sudah ditentukan. Pada tahun 2010 diterbitkan PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menggantikan PP 24 tahun 2005. Dengan berlakunya PP 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual, yang membawa perubahan besar dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia, yang awalnya berbasis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi yang mengakui, mencatat dan menyajikan transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan (Widyastuti dkk, 2015). Karena dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) harus sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif, karena seluruh arus sumber daya dicatat. Selain itu basis akrual merupakan salah satu ciri praktek manajemen keuangan modern, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan dan akuntabel mengenai biaya (*cost*) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pemerintahan (Widyastuti dkk, 2015).

Dua tahun sudah, sejak diwajibkannya pemerintah menerapkan sistem akrual basis, diharapkan pemerintah daerah dan pusat sudah mulai menata diri dengan meningkatkan kompetensi SDM nya di bidang akuntansi pemerintah dan juga sarana prasarana pendukung yang digunakan untuk operasional mereka. Satuan kerja politeknik negeri bandung pun sudah menerapkan basis akrual dalam mengakuntansikan dan penyusunan laporan keuangannya. Dalam implementasinya penerapan akrual basis ini bukanlah merupakan hal yang mudah, karena banyak hal yang harus mereka diperhatikan, seperti dukungan atasan, pendidikan, sarana prasarana dan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu, penelitian pada satuan kerja

Politeknik Negeri Bandung, menjadi pilihan untuk diteliti mengenai keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual dilihat dari kondisi penerapan akrual basis, regulasi, kompetensi SDM, hardware dan software, dan penyebarluasan informasi. Dari latar belakang tersebut diangkat judul penelitian, yaitu “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Satuan Kerja Politeknik Negeri Bandung”. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada satuan kerja politeknik negeri bandung dilihat dari kondisi penerapan akrual basis, regulasi, kompetensi SDM, hardware dan software, dan penyebarluasan informasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pemerintah di Indonesia, yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia (Faradilah dalam Widyastuti dkk, 2015). Selanjutnya Faradilah (2013) menyatakan bahwa SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna dan auditor. Penerapan SAP harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah, selain itu penerapan SAP ini diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan, baik pusat dan juga daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa informasi keuangan pemerintahan akan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan penting di pemerintahan dan akan mewujudkan kondisi transparansi serta akuntabilitas publik.

Kusnadi, dkk (1999:106) menyatakan bahwa dasar akuntansi akrual mengakui dan melaporkan efek transaksi dan kejadian lainnya atas aktiva, utang, penghasilan dan beban dari suatu organisasi bisnis dan jika dalam organisasi pemerintahan pada dana atau transaksi yang uangnya masih belum diterima atau belum dibayar. Kemudian Halim dan Kusufi (2012:54) menyatakan bahwa basis akrual (*accrual basis*) merupakan dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, kejadian dan transaksi akan dicatat dalam pencatatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Selanjutnya Mardiasmo (2002:155) mengatakan bahwa pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for services*. Hal ini bertujuan untuk mengetahui besarnya biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Selain itu Bastian (2010:315), menyatakan bahwa keuntungan basis akrual yaitu: 1) basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah dan diperoleh; 2) basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan, dan 3) basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal.

Untuk menerapkan basis akrual secara maksimal, harus didukung oleh lingkungan dalam hal ini atasan dan rekan kerja, Simanjuntak (2010) dan (Yogantara, 2012) menyatakan bahwa dukungan yang kuat dari pimpinan dan kerjasama dengan pegawai merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Ritonga (2010) dalam Halim

(2012) menyatakan harus ada komitmen dan dukungan politik dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, karena upaya penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan dana yang besar dan waktu yang lama. Menurut Simanjuntak (2010), dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Ouda (2004) menyatakan bahwa selain strategi yang dilakukan pemerintah, keterlibatan dan penerimaan implementor merupakan faktor penting dalam perubahan basis akuntansi.

Penerapan basis akrual tidak lepas dari diterbitkannya Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar berbasis kas. Davis (2010) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh pada faktor regulasi, sumber daya manusia (SDM), komitmen, dan perangkat pendukung. Peraturan perundangan tersebut harus diterapkan dengan optimal, karena bertujuan untuk meringankan entitas pemerintah dalam pengakuntansian dan juga pelaporan. Kejelasan perundang-undangan mendorong penerapan akuntansi pemerintahan dan memberikan dukungan yang kuat bagi para pimpinan kementerian/lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

Supaya penerapan basis akrual lebih optimal harus didukung oleh SDM yang berkompeten. Karena sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini meliputi sumber daya manusia yang tidak kompeten dan cenderung tidak peduli terhadap perubahan. Kualitas sumber daya manusia diukur dari kemampuan pengetahuannya (*knowledge*). Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia tersebut, semakin kuat tanggung jawab dan daya saing dalam melaksanakan tugasnya (Aldiani, 2010). Ritonga (2010) dalam Halim (2012) mengatakan dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan tersebut memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan. Selain itu, menurut Simanjuntak (2010), pada saat ini, kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM di bidang akuntansi pemerintahan (Abdurahman dkk, 2012). Termasuk di dalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Faktor sumber daya yang dimaksudkan seperti tingkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan, dan latar belakang pendidikan pimpinan.

Faktor organisasional adalah berkaitan tentang teknologi informasi dan dukungan konsultan, sedangkan faktor situasional antara lain seperti pengalaman satuan kerja dalam menjalankan basis kas menuju akrual dan ukuran satuan kerja. Kusuma (2013)

menyatakan bahwa faktor pelatihan akuntansi berbasis akrual yang diberikan kepada staf keuangan terbukti berpengaruh terhadap tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual. Hasil penelitian Ichsan (2014) juga menunjukkan bahwa entitas pelaporan perlu mempersiapkan SDM yang memahami akuntansi berbasis akrual dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan agar sistem akuntansi dapat dijalankan, dipelihara dan ditingkatkan. Pelatihan tersebut saat ini lebih dikenal dengan sebutan bimbingan teknis, baik manual dan juga komputerisasi. Di samping itu, peran dari perguruan tinggi dan organisasi profesi tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan (Grandis, 2012). Ouda (2004) mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman dari negara yang sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual terlebih dahulu, fokus terhadap program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman merupakan kunci sukses dalam perubahan basis akuntansi.

Penerapan sistem yang baru tersebut tentunya akan membutuhkan biaya yang secara signifikan cukup besar, baik untuk menyiapkan *hardware* maupun *software* yang akan digunakan. Model implementasi kebijakan Edward III (1980) menyebutkan bahwa salah satu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah fasilitas pendukung (Agustino, 2012:152). Salah satu fasilitas pendukung yang diperlukan adalah penggunaan teknologi informasi baik *hardware* maupun *software*. Kompleksitas yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual, memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit (Simanjuntak, 2010). Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengembangkan dan memodifikasi aplikasi yang selama ini telah digunakan dalam penyusunan LKKL yaitu aplikasi SAKPA menjadi aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA merupakan *software* yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Proses pengoperasian aplikasi SAIBA sama dengan aplikasi SAKPA yaitu dimulai dari perekaman dokumen, posting buku besar, dan penyusunan laporan keuangan. Sistem Informasi yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. Ketersediaan komputer (*hardware*) dan program - program akuntansi pemerintahan (*software*) akan sangat membantu SKPD dalam melaksanakan tugasnya dalam menerapkan SAP berbasis akrual.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 disajikan format laporan keuangan, adapun komponen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan juga untuk pemerintah daerah berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian / Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD penerima dana Dekonsentrasi / Tugas Pembantuan. Kajian dari Deloitte menyebutkan bahwa akuntansi berbasis akrual secara signifikan memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan untuk efisiensi dan efektivitas pengeluaran publik melalui informasi keuangan yang akurat dan transparan (Simanjuntak, 2005). Penerapan akuntansi berbasis akrual merupakan hal yang baru dalam penyusunan LKKL, namun hal tersebut diyakini memiliki kemampuan untuk

meningkatkan kualitas laporan keuangan (Christanti, 2013). Laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada pihak yang berwenang secara tepat waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Kristiawati (2012) berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah Kalimantan Barat, memperlihatkan bahwa komitmen atasan, kualitas SDM dan perangkat pendukung sangat berpengaruh dalam penerapan SAP berbasis akrual. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Devi Safitri (2017) berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis), kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, sistem informasi dan komunikasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Kadek Nila Karyogis dkk 2017), berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli, yang memperlihatkan bahwa kompetensi SDM, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap penerapan akuntansi basis akrual.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif interpretif. Peneliti memilih pendekatan interpretif dikarenakan dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menginterpretasikan sejauh mana keberhasilan satuan kerja politeknik negeri bandung dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini diawali dengan observasi dan menyiapkan daftar wawancara, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dengan teknik analisis yang dilakukan Sugiyono (2010:91) untuk dibuat laporan penelitiannya. Analisis akan dilakukan dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya dengan keadaan ideal pada bagian teori. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah *purposive*, menurut Sugiyono (2011:68) teknik ini tidak melakukan generalisasi namun penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Penentuan informan berdasarkan keterlibatan mereka dalam pengakuntansian dan penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara pada satuan yang bersangkutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif yang dilakukan Sugiyono (2010:91), yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan keputusan atau verifikasi. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara menunjukkan bahwa satuan kerja Politeknik Negeri Bandung, selalu berusaha untuk memahami dan menerapkan akuntansi akrual basis secara

optimal. Hal ini terlihat saat dilakukan wawancara kepada informan, terlihat bahwa mereka sangat memahami mengenai akuntansi basis akrual dan selalu berusaha untuk meningkatkan kualifikasi mereka baik akuntansi pemerintah manual dan juga yang terkomputerisasi seperti SAIBA dan SIMAK BMN. Dalam penerapan SAP berbasis akrual ini memang sudah seharusnya pihak manajemen suatu organisasi yang menerapkannya memiliki kemampuan untuk memahami basis akrual. Karena keberhasilan suatu entitas akan terlihat dari kemampuan anggota entitas dan dukungan lingkungan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

4.1 Lingkungan / Kondisi yang berorientasi pada penerapan akuntansi akrual.

Untuk menerapkan akuntansi basis akrual, selain diperlukan latar pendidikan yang sesuai, juga sangat diperlukan dukungan atasan, rekan sekerja serta sarana parasana yang memadai. Informan menyatakan bahwa:

“Sikap atasan sangat mendukung dalam penerapan basis akrual ini, walaupun mereka (*midle management*) kurang memahami basis ini”. “Sikap rekan kerja sangat mendukung dan sarana prasarana cukup memadai”. “Sedangkan peraturan yang ada justru memudahkan dalam menyamakan persepsi”.

Dari tanggapan di atas terlihat bahwa “*midle*” kurang memahami, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan yang berbeda, sehingga agak lambat dalam merespon. Sedangkan dukungan rekan kerja, sarana prasarana sangat baik dan memadai.

4.2 Regulasi

Penerapan basis akrual tidak lepas dari diterbitkannya Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar berbasis kas. Regulasi ini harus diterapkan secara optimal, hal ini seperti yang dinyatakan Informan, yang menyatakan bahwa:

“Karena sifatnya kebijakan nasional, maka regulasi yang diatur pihak pemerintah sudah menyeluruh penerapannya. Untuk saat ini regulasi berjalan sesuai ketentuan dan dapat dilaksanakan sebagaimana kebijakan yang ada. IT hanya memfasilitasi pada proses penyusunan laporan, untuk transaksi harian masih bersifat manual dan semi elektronik”.

Sampai saat ini satuan kerja politeknik negeri bandung selalu menerapkan regulasi secara optimal dan merasa terbantu dengan adanya regulasi tersebut.

4.3 SDM yang Kompeten

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama dan juga penggerak utama roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Kegagalan SDM dalam memahami dan menguasai akuntansi akrual basis akan berdampak pada kesalahan dalam pengakuntansian dan penyusunan laporan

keuangan, akhirnya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Pengakuntansian dan penyusunan laporan keuangan memerlukan SDM yang menguasai akuntansi pemerintahan, seperti yang dikatakan oleh Bastian (2000) pada saat ini kebutuhan tersebut sangat terasa dengan semakin kuatnya upaya untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Latar belakang pendidikan ekonomi akuntansi, sangat diperlukan untuk menangani hal tersebut. Sampai saat ini SDM keuangan satker Politeknik Negeri Bandung, berlatar belakang pendidikan ekonomi, sebagian besar akuntansi dan manajemen, seperti yang dinyatakan oleh informan menyatakan:

“Latar belakang pendidikan akuntansi, yang sangat berpengaruh pada pemahaman dan penerapan akrual basis secara aplikatif. Karena akuntansi akrual menghendaki setiap operator harus pandai dalam menempatkan setiap kode akun yang sesuai dengan basisnya. Secara menyeluruh perlu dilakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan memperoleh kesepakatan. Bimtek selalu dilakukan dalam setiap kegiatan rekonsiliasi dan selalu dijelaskan. Sarana yang ada saat ini perlu ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tingkat cakupan data yang ada dan terus berkembang. Sampai saat ini karena proses penyampaian laporan yang berjenjang dan sistematis, maka pengerjaannya harus tepat waktu.”

Sampai saat ini petugas yang bekerja di bagian keuangan satker politeknik negeri bandung, memiliki latar belakang pendidikan sebagian besar akuntansi, baik jenjang sarjana ataupun diploma 3, walau ada juga yang manajemen. Tetapi hal tersebut bukanlah halangan bagi mereka untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi keilmuannya. Apalagi kementerian yang berwenang selalu memberikan bimtek akuntansi pemerintah basis akrual, karena hal ini akan meningkatkan kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas.

4.4 Informasi Teknologi (Sistem akuntansi komputerisasi - *software*)

Penerapan sistem yang baru tersebut tentunya akan membutuhkan biaya yang secara signifikan cukup besar, baik untuk menyiapkan *hardware* maupun *software* yang akan digunakan. Aplikasi SAIBA merupakan *software* yang dirancang sebagai sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, selain itu diperlukan *hardware* yang sesuai dengan *software* SAIBA. Seperti yang disampaikan oleh informan:

“Aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, maka aplikasi tersebut sangat membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Mudah digunakandan sangat membantu. Kode akun yang ada lebih spesifik, sehingga perlu waktu untuk lebih menguasai “perilaku” aplikasi yang digunakan”

Perubahan *software* yang digunakan, berawal dari MAKUDA, SIKD dan saat ini SAIBA, perlu penyesuaian dalam penggunaannya. Karena ketekunan dan loyalitas, maka mereka sampai saat ini sudah mampu menggunakannya dengan baik. Sedangkan untuk pengelolaan barang milik negara digunakan SIMAK BMN.

4.5 Perangkat pendukung (*hardware*)

Adapun *hardware* yang digunakan harus sesuai dengan *software* SAIBA atau *software* lain, seperti yang disebutkan oleh informan:

“Sampai saat ini *hardware* yang digunakan untuk menunjang *software* sudah sesuai, yang digunakan khusus untuk digunakan oleh operator SAIBA dan sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan”.

Sampai saat ini, spesifikasi hardware sudah sesuai dan hanya digunakan untuk mengerjakan dengan aplikasi wajib

4.6 Penyebarluasan Informasi

Dalam PP No 71 Tahun 2010 disajikan format laporan keuangan, adapun komponen Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan juga untuk pemerintah daerah berbasis akrual adalah Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disajikan seperti yang disebutkan oleh informan adalah:

“Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas. Neraca triwulan, semester dan tahunan, catatan atas barang milik negara serta catatan ringkas BMN (aset tetap dan aset lancar). Laporan keuangan ini disampaikan ke tingkat UAKPW, KPKNL-UAKPW-E1, Kantor wilayah dan eselon 1. Laporan keuangan harus disampaikan pada tanggal 10 setiap bulan. Sedangkan kendala pengumpulannya yaitu waktu pengerjaan yang sempit, dokumen yang harus diproses bertumpuk diakhir tahun dan belum optimalnya dukungan manajemen”.

Laporan keuangan yang disusun harus disampaikan kepada kementerian yang berwenang, karena di akhir periode biasanya, banyak dilakukan realisasi anggaran atau pelaksanaan penyerapan anggaran, maka dokumen yang diproses lebih banyak dari biasanya. Selain itu karena waktu yang sempit dan dokumen yang diproses banyak, serta kurang optimalnya dukungan manajemen, mereka agak kewalahan.

5. PENUTUP

Satuan kerja politeknik negeri bandung, sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual, sesuai dengan PP 71 tahun 2010 tentang SAP. Latar belakang pendidikan akuntansi yang mereka miliki mempermudah mereka dalam memahami dan menerapkan standar ini saat pengakuntansian dan penyusunan laporan keuangan. Walaupun sampai saat ini *middle management* belum begitu memahami akuntansi basis akrual, tetapi dukungan mereka kepada para pegawai sangat baik, dan dukungan yang baik dari rekan sejawat. Hal lain yang memudahkan mereka dalam menerapkan akuntansi basis akrual ini adalah regulasi dan juga sarana serta prasarana yang digunakan (*software dan hardware*), sangat mendukung dalam pengerjaan tugas mereka. Tetapi jika sudah berada di akhir periode, mereka mengalami kerepotan dalam pengakuntansian dan pelaporan, hal ini terjadi karena dokumen pertanggungjawaban yang harus mereka proses sangat banyak serta persiapan yang harus mereka lakukan untuk realisasi awal periode. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Lingkungan / kondisi yang berorientasi pada penerapan akuntansi akrual sangat mendukung

2. Regulasi yang ada dapat diterapkan dengan baik tanpa kendala
3. SDM yang kompeten, sudah dimiliki oleh satker Politeknik Negeri Bandung
4. Informasi teknologi (sistem komputerisasi - *software*) sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan
5. Perangkat pendukung (*hardware*) yang dimiliki satker sangat mendukung dan sesuai dengan *software* yang digunakan
6. Penyebarluasan informasi, dapat diselesaikan dengan baik walau agak kerepotan karena akhir periode.

Adapun saran yang dapat diberikan supaya mereka tetap dapat mempertahankan kinerja, diharapkan ada solusi dari pihak manajemen sehingga diakhir tahun tidak terjadi penumpukan pemerosesan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasih, A.Chaedar, 2011, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Halim, Abdul dan M.S. Kusufi, 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat.
- Karyogis, Kadek Nila dan I Made Pande Dwiana Putra, 2017. “*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kabupaten Bangli*. Fakulta Ekonomi, Universitas Udayana.
- Kristiawati, Endang 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasil Akrual pada Pemda Kalimantan Barat*, Thesis, MAKSI Unsoed, Purwokerto.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edis kedua, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nugrohowati, Anik, 2007, *Penerapan akuntansi Berbasis Akrual di Organisasi Sektor Publik di Yogyakarta*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sesktor Publik, Vol8, No.2, Agustus 2007.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta..
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI.

Safitri, Devi 2017. "*Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkalis)*". Fakultas Ekonomi, Universitas Riau.

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

—————, 2011. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.